

EVALUASI PENGELOLAAN FASILITASI BELAJAR PADA PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI 1 TIRENGGO

EVALUATION LEARNING FACILITY MANAGEMENT IN INCLUSIVE EDUCATION PROGRAM IN STATE ELEMENTARY SCHOOL 1 TIRENGGO

Endang Yuliasuti Wahyu Wardani
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
endang.yuliasuti@ student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas perencanaan dan pelaksanaan fasilitas belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tirenggo.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis evaluasi dengan model *discrepancy* dan metode penelitian survey. Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Tirenggo dalam rentang waktu 23 April sampai dengan 12 Mei 2018. Objek evaluasi dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru kelas, dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Keabsahan data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data dengan menghitung nilai presentase capaian standar efektifitas, kemudian membandingkannya dengan tabel kriteria efektifitas pengelolaan fasilitas belajar.

Hasil penelitian evaluasi ini adalah: (1) Perencanaan fasilitas belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tirenggo cukup efektif yaitu memenuhi 50% kriteria standar pengelolaan fasilitas belajar. (2) Pelaksanaan fasilitas belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tirenggo sangat efektif yaitu memenuhi 100% kriteria standar pengelolaan fasilitas belajar.

Kata kunci: evaluasi, pengelolaan fasilitas belajar, program pendidikan inklusif

Abstract

This study aimed to determine the effectiveness of planning and implementation of learning facility in inclusive education program in State Elementary School 1 Tirenggo.

This is an evaluation research with discrepancy model and survey research method. The study was performed in State Elementary School 1 Tirenggo from 23 April to 12 May 2018. The evaluation objects in this study were referring to principal, teachers and Special Assistant Teachers. The data collection techniques were observation, interview, and document analysis. Data validity used was data triangulation. Data analysis technique used calculating of percentage value of the effectiveness standard, then comparing it to the criteria table for the effectiveness of learning facility management.

The results of this evaluation research are: (1) The planning of learning facility in the inclusive education program in State Elementary School 1 Tirenggo is effective enough that is meet 50% standard criteria for learning facility management. (2) The implementation of learning facility in the inclusive education program in State Elementary School 1 Tirenggo is very effective that is meet 100% standard criteria for learning facility management.

Keywords: evaluation, learning facility management, inclusive education program

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai hak paling dasar yang sifatnya universal perlu untuk terus disebarluaskan demi tewujudnya manusia yang

cerdas secara global. Ini sesuai dengan apa yang diyakini UNESCO bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia sepanjang hidup dan akses atas pendidikan harus sesuai dengan kualitas pendidikan. Indonesia sebagai negara yang terus

berusaha memperbaiki sistem pendidikannya mendukung penuh dengan adanya program pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama-sama dengan

peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Adapun kebijakan dan peraturan perundang-undangan secara nasional yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif saat ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 Pasal 31 Ayat 1; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam Pasal 6 Ayat 1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Peserta didik dalam Pasal 9 Ayat 2, Pasal 51 dan Pasal 52; serta Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan kecerdasan bakat/istimewa dalam Pasal 3 Ayat 1, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 1 dan 2 serta Ayat 3.

Jika melihat hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan pengelolaan sekolah inklusif nampak belum semua sekolah inklusif di Indonesia dikelola dengan baik dalam artian mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan peserta didik di kelas yang heterogen. Di provinsi DIY sendiri, sekolah penyandang gelar inklusif semakin meningkat jumlahnya pasca deklarasi inklusif digagas Gubernur DIY akhir tahun 2014 lalu (Guntoro, 2015). SD Negeri 1 Tlirenggo sebagai salah satu sekolah *pilot project* inklusif di Kecamatan Bantul yang telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul sejak tahun 2013 telah menerima ABK untuk belajar bersama peserta didik normal dalam ruang dan situasi yang sama.

Namun begitu, dari hasil observasi awal sejak tanggal 15 September–15 November 2018 di lapangan nampak masih banyak problem terkait dengan fasilitasi belajar peserta didik di sekolah tersebut. Persebaran jumlah ABK yang tidak merata, dimana kelas 4B dominan ABK sedangkan kelas 4A semua adalah peserta didik regular menjadikan tantangan tersendiri bagi guru kelas 4B dalam memfasilitasi peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, kurangnya GPK di sekolah ini juga menyebabkan tidak semua ABK dapat terfasilitasi secara maksimal. Perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber belajar di SD

Negeri 1 Tlirenggo juga belum dikelola dengan baik. Selain itu, di dalam laboratorium sekolah juga banyak media pembelajaran yang pemanfaatannya belum maksimal, bahkan ada yang masih terbungkus rapi. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik dapat mempermudah penyampaian materi atau pengetahuan kepada peserta didik.

Dan yang menjadi perhatian adalah selama 5 tahun sejak dikeluarkannya SK dari dinas pendidikan Bantul terkait sekolah inklusi, belum pernah dilakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan fasilitasi belajarnya. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melihat bagaimana fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tlirenggo dikelola, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tlirenggo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian jenis evaluasi dengan model *discrepancy* dan metode penelitian survey. Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Tlirenggo dalam rentang waktu 23 April sampai dengan 12 Mei 2018. Objek evaluasi dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru kelas, dan Guru Pendamping Khusus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Keabsahan data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data dengan menghitung nilai presentase capaian standar efektifitas, kemudian membandingkannya dengan tabel kriteria efektifitas pengelolaan fasilitasi belajar.

Jenis dan Model Evaluasi

Penelitian ini merupakan penelitian jenis evaluasi dengan menggunakan model *discrepancy* (kesenjangan) yakni menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program (Arikunto dan Jabar, 2009:48). Evaluasi dilakukan untuk mengukur

besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yakni metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (Sugiyono, 2013:12).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di SD Negeri 1 Trirenggo dalam kurun waktu 23 April sampai dengan 12 Mei 2018.

Objek Evaluasi

Objek dalam penelitian ini adalah target/sasaran tempat diperolehnya informasi terkait penelitian, meliputi: kepala sekolah, guru kelas, dan GPK. Pihak-pihak tersebut dianggap tahu tentang pengelolaan fasilitas belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Trirenggo. Pemilihannya menggunakan teknik *purposive sample* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan/teliti (Sugiyono, 2013:300).

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan: 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Observasi dilaksanakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru wali kelas dan GPK, serta untuk mengetahui ketersediaan sarana prasarana yang menunjang aksesibilitas ABK. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran di dalam kelas terkait dengan media dan sumber belajar serta strategi pembelajaran yang digunakan. Selain itu juga untuk mengamati secara langsung ketersediaan dan penggunaan sarana prasarana yang menunjang aksesibilitas ABK.

Instrument observasi berupa kisi-kisi observasi seperti dalam tabel berikut.

No.	Aspek yang diamati	Komponen
1.	Strategi pembelajaran yang digunakan	- Strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam membelajarkan peserta didik normal di kelas inklusif - Strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam membelajarkan ABK di kelas inklusif
2.	Media dan sumber belajar yang digunakan	- Media dan sumber belajar yang digunakan guru di kelas inklusif untuk membelajarkan peserta didik normal - Media dan sumber belajar yang digunakan guru di kelas inklusif untuk membelajarkan ABK
3.	Ketersediaan sarana prasarana	- Ketersediaan sarana prasarana umum di kelas inklusi serta sarana prasarana pendukung untuk ABK

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan fasilitas belajar di SD Negeri 1 Trirenggo melalui kepala sekolah, guru kelas, dan GPK.

Instrument wawancara berupa kisi-kisi wawancara seperti pada tabel berikut.

No.	Aspek yang dikaji	Komponen	Sumber data
1.	Perencanaan fasilitas belajar pada program pendidikan inklusif	a. Kurikulum nasional yang digunakan b. RPP/Silabus untuk kelas inklusif c. PPI untuk ABK	Kepala sekolah, guru kelas yang memiliki peserta didik ABK, GPK
2.	Pelaksanaan fasilitas belajar pada program pendidikan inklusif	a. Sarana prasarana/fasilitas umum yang ada di sekolah inklusif b. Media dan sumber belajar yang digunakan di kelas inklusif c. Strategi pembelajaran yang digunakan di kelas inklusif	Guru kelas dan GPK

Analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mendukung dalam penelitian. Dokumen yang diperlukan meliputi dokumen sekolah mengenai visi dan misi sekolah inklusi, RPP/Silabus, dan PPI yang mendukung pengelolaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Trirenggo.

Instrument analisis dokumen berupa kisi-kisi seperti dalam tabel berikut ini.

No.	Aspek yang digunakan	Komponen
1.	Perencanaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif	a. Dokumen visi dan misi sekolah inklusif b. Arsip jumlah ABK dan persebaran kelasnya c. Arsip daftar sarana prasarana/fasilitas yang ada di SD Negeri 1 Trirenggo d. Arsip RPP/Silabus untuk kelas inklusif

Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013:327). Untuk mendapatkan data yang kredibel dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung presentase standar kriteria efektifitas pengelolaan fasilitasi belajar yang terpenuhi dengan rumus sebagai berikut.

Nilai presentase capaian standar efektifitas =

$$\left(\frac{\text{bagian}}{\text{seluruh}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

Bagian : jumlah indikator yang terpenuhi

Seluruh : jumlah keseluruhan indikator

2. Menentukan tingkat keefektifan pengelolaan fasilitasi belajar

Setelah presentase ditemukan maka selanjutnya adalah membandingkan nilai presentase keberhasilan dengan tabel kriteria efektifitas pengelolaan fasilitasi belajar untuk mendapatkan kesimpulan seberapa efektif pengelolaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Trirenggo.

Kategori	Kriteria
Sangat efektif	Jika mencapai 81-100%
Efektif	Jika mencapai 61-80%
Cukup efektif	Jika mencapai 41-60%
Kurang efektif	Jika mencapai 21-40%
Tidak efektif	Jika mencapai <21%

Dikutip dari Arikunto dan Jabar (2009:35)

Kriteria Keberhasilan

Kriteria dapat diartikan sebagai tolak ukur atau standar dalam menilai sesuatu. Untuk menentukan seberapa efektif tingkat pengelolaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif, maka digunakan kriteria keberhasilan sebagai berikut.

1. Perencanaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Trirenggo terdiri dari indikator keberhasilan sebagai berikut.
 - a. Signifikansi atau kebermaknaan yakni perencanaan disusun atas dasar kebutuhan peserta didik dilihat dari hasil assesmen melalui tes formal, hasil asesmen dengan observasi guru dan keterlibatan orang tua ABK, serta dokumen PPI dan RPP yang disusun guru kelas.
 - b. Relevan yakni perencanaan disesuaikan dengan kurikulum nasional dan karakteristik peserta didik yang dilihat dari Silabus dan RPP, apakah ada catatan untuk beberapa siswa yang memiliki gangguan, dan untuk ABK yang tidak dapat mengikuti kurikulum reguler maka disusun PPI.
 - c. Kepastian yakni perencanaan berisi langkah-langkah yang sistematis dilihat dari RPP dan PPI bagian langkah-langkah

pembelajaran berisi bagian pendahuluan, inti, dan penutup.

- d. Adaptabilitas atau tidak kaku yakni perencanaan dapat diimplementasikan oleh setiap orang dalam berbagai keadaan dan kondisi dilihat dari beragam tidaknya opsi media dan sumber belajar serta strategi pembelajaran yang disediakan dalam RPP terkait dengan POBATEL dan pembelajaran berbasis peserta didik.
- e. Kesederhanaan yakni perencanaan harus mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan dilihat dari penggunaan kalimat yang sederhana dan jelas.
- f. Prediktif yakni perencanaan sebaiknya dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dilihat dari RPP bagian media dan metode pembelajaran memberikan opsi lebih dari satu sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan bila tidak dapat digunakan salah satunya, serta adanya modifikasi kurikulum yakni dengan memberikan catatan-catatan yang diperlukan bagi beberapa ABK.

2. Pelaksanaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tirirenggo terdiri dari indikator keberhasilan sebagai berikut.

- a. Kesesuaian fasilitas umum dengan kebutuhan peserta didik di kelas inklusif dilihat dari sarana prasarana yang disediakan sekolah merujuk pada data fasilitas sekolah dan daftar ABK tahun berjalan yang didasarkan juga pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013.
- b. Kesesuaian media dan sumber belajar dengan keberagaman peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas inklusif dilihat dari unsur POBATEL (pesan, orang, bahan, alat, dan teknik) sebagai media dan sumber belajar yang ada di sekolah serta daftar ABK pada tahun berjalan.

- c. Efektifitas strategi pembelajaran di kelas inklusif dilihat dari penggunaan metode pembelajaran yang student center, adanya bimbingan personal guru kelas, dan adanya bimbingan GPK bagi peserta didik yang kesulitan mengikuti pembelajaran di dalam maupun di luar kelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif

Istilah inklusi oleh Smith (2015:45) diartikan sebagai penerimaan peserta didik yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri atau visi misi sekolah. Kemudian dalam pertemuan Salamanca dipertegas bahwasannya kurikulum yang baik harus fleksibel dan responsive terhadap keberagaman kebutuhan semua peserta didik (ada penyesuaian terhadap tingkat dan irama perkembangan peserta didik) (Marthan, 2007: 156). Dari sini nampak bahwa sekolah inklusi tetaplah sekolah reguler yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan tetap berusaha memberikan layanan yang sesuai dengan kehususannya, salah satunya dengan memodifikasi kurikulum agar tetap responsif terhadap keunikan tiap peserta didiknya.

Smith (2015: 404) menyatakan bahwa orang tua ABK harus terlibat secara berkesinambungan dengan pendidik terutama dalam memberikan keterangan yang bernilai terkait dengan karakteristik anaknya. Jelaslah bahwa usaha modifikasi kurikulum ini perlu adanya keterlibatan orang tua atau wali ABK dalam memberikan masukan atau keterangan penting terkait dengan ABK tersebut dengan harapan kurikulum yang disusun dapat efektif.

Bentuk lanjutan dari modifikasi ini berupa PPI (Program Pembelajaran Individual) yang diperuntukkan bagi ABK yang tidak dapat mengikuti kurikulum reguler. Sebelum perencanaan pembelajaran dilakukan perlu adanya asesmen terlebih dahulu sebagai upaya

mendapatkan informasi tentang hambatan belajar dan kemampuan yang sudah dimiliki serta kebutuhan yang harus dipenuhi, agar dapat dijadikan dasar dalam membuat program pembelajaran sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik (Tarmansyah, 2007: 183).

SD Negeri 1 Trirenggo sebagai sekolah inklusif tetap menggunakan kurikulum nasional/reguler yaitu Kurikulum 2013 (K-13) untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 serta KTSP untuk kelas 3 dan 6. Ini sudah sesuai dengan konsep sekolah inklusif yang mana tetap menggunakan kurikulum reguler dalam proses pembelajarannya dan memodifikasinya bila diperlukan.

Namun begitu ternyata sekolah melakukan modifikasi kurikulum hanya untuk keperluan kegiatan lomba sekolah inklusif, bukan untuk kegiatan pembelajaran peserta didik, dan disusun hanya oleh GPK. Ini bertentangan dengan konsep fasilitasi belajar yang mana modifikasi kurikulum penting dilakukan bagi beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan beberapa jenis hambatan.

Selain itu, sekolah tidak melibatkan wali ABK sebagai sumber data dalam penyusunan modifikasi kurikulum selain pada hasil asesmen yang ada. Terkait dengan PPI, sekolah juga tidak menyusunnya untuk kegiatan pembelajaran melainkan hanya formalitas jika diadakan kegiatan lomba, sebagai pelengkap administrasi, seperti lomba sekolah inklusi tingkat kabupaten pada tahun sebelumnya.

Asesmen dapat dilakukan menggunakan tes, tugas dan analisis, serta observasi. Tes formal seperti yang terstandarisasi khusus untuk ABK dan juga tes informal yaitu yang dibuat pendidik untuk setiap peserta didik. Observasi ketika peserta didik melakukan tes informal memberikan gambaran tentang ke berfungsian peserta didik (disarikan dari Tarmansyah, 2007:187-188).

Terkait dengan asesmen, SD Negeri 1 Trirenggo pada tahun 2017 lalu untuk pertama kalinya mengadakan asesmen menggunakan tes formal dari psikolog/lembaga profesional. Untuk

tahun-tahun sebelumnya asesmen hanya dilakukan dengan observasi langsung oleh guru kelas baik pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung maupun melalui tanya jawab dengan orang tua ABK. Hasil temuan dari observasi yang dilakukan guru kelas kemudian didiskusikan dengan GPK untuk menentukan tindak lanjut yang tepat terkait dengan layanan bagi ABK di setiap kelas inklusif. Ini sudah sesuai dengan tujuan dari asesmen itu sendiri seperti pendapat Tarmansyah di atas. Meski begitu, asesmen di SD Negeri 1 Trirenggo menjadi seperti berdiri sendiri karena tidak dijadikan pijakan dalam modifikasi kurikulum. Seperti dipaparkan sebelumnya bahwa sekolah tersebut tidak melakukan modifikasi kurikulum maupun penyusunan PPI bagi peserta didik yang ternyata memiliki hambatan tertentu.

Jika dikaitkan dengan kriteria perencanaan yang efektif menurut Sanjaya, (2013:37-40) dapat ditemukan hasil analisis sebagai berikut.

- a) Signifikansi/kebermaknaan yaitu perencanaan pembelajaran disusun atas dasar kebutuhan peserta didik sehingga proses pembelajaran bermakna serta berjalan efektif dan efisien. Kriteria ini belum terpenuhi karena belum didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Belum didasarkan pada asesmen maupun melibatkan orang tua ABK, kurikulum juga tidak dimodifikasi untuk kepentingan pembelajaran. Jadi kriteria signifikansi/kebermaknaan belum terpenuhi.
- b) Relevan/sesuai dengan kurikulum dan karakteristik peserta didik. Sudah sesuai dengan kurikulum reguler yang ditetapkan pemerintah yakni KTSP dan Kurikulum 2013 tetapi belum didasarkan pada karakteristik setiap peserta didiknya, terutama bagi ABK. Perencanaan masih disusun secara amat reguler tanpa memberikan catatan-catatan terkait kebutuhan ABK di kelas yang bersangkutan. Jadi, kriteria relevan belum terpenuhi.
- c) Kepastian artinya berisi langkah-langkah pasti yang sistematis. Perencanaan yang

disusun para pendidik/guru kelas di SD Negeri 1 Tlirenggo sudah berisi sintak-sintak yang jelas sehingga mudah dalam pengaplikasiannya. Sehingga, kriteria kepastian sudah terpenuhi.

- d) Adaptabilitas/tidak kaku artinya dapat digunakan oleh setiap orang dalam berbagai keadaan dan kondisi pada saat implementasi. Dalam perencanaan pendidik memberikan opsi lebih dari satu terkait penggunaan strategi pembelajaran maupun media sehingga dapat dipilih sesuai dengan kondisi pembelajaran pada saat itu. Sehingga kriteria adaptabilitas sudah terpenuhi.
- e) Kesederhanaan dalam artian mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Bahasa yang digunakan dalam perencanaan cukup sederhana sehingga mudah dipahami oleh guru lain apabila pada suatu waktu harus menggantikan guru yang bersangkutan karena tidak dapat mengajar pada jam tersebut. susunannya juga tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami. Sehingga kriteria kesederhanaan sudah terpenuhi.
- f) Prediktif sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Kriteria prediktif belum terpenuhi karena perencanaan bersifat reguler tanpa adanya modifikasi sehingga ketika ada peserta didik yang memiliki hambatan ternyata tidak dapat mengikuti atau mengalami kesulitan tidak diberikan opsi lain untuk peserta didik tersebut. sehingga kriteria prediktif belum terpenuhi.

Dari 6 kriteria perencanaan efektif seperti dipaparkan di atas, hanya 3 kriteria yang dinyatakan sudah terpenuhi yakni kriteria kepastian, adaptabilitas, dan kesederhanaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun oleh para pendidik di SD Negeri 1 Tlirenggo belum efektif.

2. Pelaksanaan Fasilitas Belajar pada Program Pendidikan Inklusif

a. Kesesuaian fasilitas umum yang tersedia dengan kebutuhan peserta didik

Fasilitas atau sarana prasarana minimum yang perlu ada disetiap satuan pendidikan seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan meliputi: sarana yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; dan prasarana yaitu lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selain sarana prasarana seperti telah disebutkan, bagi ABK yang membutuhkan layanan pendidikan khusus perlu juga menggunakan sarana prasarana khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhannya. Seperti disarikan dari Tarmansyah (2007: 169-171) disebutkan bahwa contoh sarana prasarana yang perlu dilengkapi dalam sekolah inklusi meliputi: setiap fasilitas umum perlu adanya *hand rill* dan jalan yang dapat dilalui kursi roda. Ruangan-ruangan khusus untuk memberikan layanan ABK juga perlu disediakan seperti ruang asesmen, ruang konsultasi, ruang remedial, ruang terapi, dan ruang peralatan. Ruangan-ruangan tersebut dapat digunakan secara fleksibel bagi peserta didik yang membutuhkan layanan khusus dari berbagai jenis gangguan anak.

Fasilitas umum atau sarana prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang tersedia di SD Negeri 1 Tlirenggo meliputi: sarana yaitu furnitur, alat elektronik untuk pendidikan, buku-buku, komputer, media pendidikan, dan sumber belajar lainnya; dan prasarana yaitu tanah/lahan, 12 ruang kelas,

ruang laboratorium, ruang keterampilan, ruang kesenian, ruang perpustakaan, ruang ibadah/mushola, ruang UKS, ruang koperasi, 7 ruang mandi/WC umum dan 1 ruang mandi/WC disabilitas, ruang guru, ruang TU, dan ruang kepala sekolah. Sarana prasarana umum yang disediakan SD Negeri 1 Tpirenggo sudah sesuai dengan sarana prasarana minimum yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013.

Terkait dengan sarana prasarana khusus yang disediakan SD negeri 1 Tpirenggo meliputi: sarana yaitu a) jalan yang dibuat menurun (*krengsengan*) di beberapa fasilitas umum, kursi roda dan *walker* yang diperuntukan bagi ABK tunadaksa terutama dengan hambatan berjalan. Mengingat di sekolah tersebut ada 1 peserta didik pengguna kursi roda dan 1 peserta didik pengguna *walker*, fasilitas ini sudah dapat memudahkan aksesibilitas mereka. b) *westafel*, fasilitas ini juga mempermudah ABK tunalaras untuk akses kebersihan seperti cuci tangan; dan prasarana yaitu ruang sumber dan ruang bimbingan konseling yang digunakan untuk membimbing secara peronal antara GPK dengan ABK. Ruangan ini juga difungsikan sebagai ruang asesmen bersama dengan ruang UKS, ruang remidi bagi beberapa ABK seperti slow learner dan retardasi mental, ruang konsultasi orang tua ABK dengan GPK, ruang konsultasi guru kelas dengan ABK. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana khusus yang di sediakan SD Negeri 1 Tpirenggo sudah sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa SD negeri 1 Tpirenggo terkait fasilitas atau sarana prasarana yang disediakan sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut. Baik sarana prasarana umum maupun khusus sudah disediakan dan difungsikan dengan cukup maksimal, hanya beberapa ruangan seperti laboratorium yang memang belum difungsikan maksimal, selebihnya sudah berfungsi maksimal.

b. Kesesuaian media dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan keberagaman peserta didik

Media dan sumber belajar di kelas inklusif tidak berbeda jauh dengan kelas reguler, karena ABK yang masuk dalam sekolah inklusif hanya mereka yang memiliki gangguan dengan kategori ringan dan sedang. Media pembelajaran seperti dalam kerucut pengalaman Edgar Dale dalam Sanjaya (2013:166) meliputi pengalaman abstrak ke konkret, dari: a) verbal; b) lambang visual; c) visual; d) radio; e) film; f) televisi; g) karyawisata; h) demonstrasi; i) pengalaman melalui drama; j) pengalaman melalui benda tiruan; dan k) pengalaman langsung, memiliki prinsip semakin konkret media pembelajaran yang digunakan peserta didik maka akan semakin banyak pengalaman yang diperoleh dan bertahan lama dalam struktur ingatannya. Sedangkan sumber belajar berupa POBATEL yaitu pesan, orang, bahan, teknik, dan lingkungan (Mudjiman, 2008: 17). Dalam proses belajar, pengetahuan yang didapatkan peserta didik akan lebih dalam dan luas apabila sumber belajar yang digunakan bervariasi, tidak terbatas pada satu sumber saja.

Jika melihat pada data jenis ABK yang ada di SD Negeri 1 Tpirenggo, terdapat 7 jenis kebutuhan khusus yakni hambatan belajar, retardasi mental atau tunagrahita, tunaganda, slow learner, tunarungu wicara, autisme, dan kesulitan belajar. Masing-masing memiliki kebutuhan akan jenis media dan sumber belajar tertentu untuk memaksimalkan proses penyampaian informasi, seperti: 1) slow learner lebih baik menggunakan media pembelajaran yang variatif agar peserta didik tidak mudah bosan, 2) autisme perlu mendapatkan bimbingan khusus dari GPK, 3) kesulitan belajar cocok dengan peta konsep dan alat bantu memori seperti kalkulator dan daftar ejaan, 4) tunarungu wicara usahakan ada referensi tertulis untuk setiap materi, demikian juga alat peraga yang konkrit, 5) tunagrahita/retardasi mental memerlukan bantuan alat mengenal konsep

bilangan, alat pengajaran bahasa, dan alat latihan akademik (disarikan dari Tarmansyah, 2007: 193).

Jika melihat pada hasil penelitian tampak bahwa media dan sumber belajar yang digunakan para pendidik di SD Negeri 1 Tirenggo cukup bervariasi dan bersifat umum untuk seluruh peserta didik tanpa dibedakan antara peserta didik reguler dan ABK. Media dan sumber belajar yang digunakan meliputi: a) orang yakni guru kelas; guru mata pelajaran; dan GPK, b) lingkungan yakni ruang kelas; halaman sekolah; dan perpustakaan, c) bahan yakni buku, gambar; dan video, serta d) peralatan yakni papan tulis dan proyektor.

Jika dikaitkan dengan kebutuhan seluruh peserta didik di sekolah tersebut nampak bahwa penggunaan media dan sumber belajar yang sudah variatif ini dapat memperpanjang fokus peserta didik slow learner, sudah membantu peserta didik autis mempermudah perolehan pengetahuan melalui bimbingan GPK, sudah mempermudah peserta didik berkesulitan belajar dengan bantuan media peta konsep yang dipaparkan langsung oleh guru kelas, sudah memantu peserta didik tunarungu-wicara dengan beragamnya referensi tertulis untuk setiap yang dipelajarinya, bagi retardasi mental juga mendapatkan bimbingan secara lebih intensif dari guru kelas. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya media dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan keutuhan peserta didik di sekolah tersebut, terlepas dari masih banyaknya media dan sumber belajar yang belum difungsikan maksimal. Hal ini karena media dan sumber belajar yang digunakan para pendidik dirasa sudah dapat mewakili setiap keberagaman kebutuhan peserta didiknya.

c. Efektifitas strategi pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas inklusif

Strategi pembelajaran berkaitan dengan proses penyampaian materi, dimana dalam pelaksanaannya akan berinteraksi dengan situasi

belajar yang lebih akrab dengan istilah metode pembelajaran. Dalam penentuan strategi pembelajaran harus selalu memperhatikan komponen tujuan dan karakteristik bidang studi, kendala, dan karakteristik peserta didik sebagai variabel kondisi yang sifatnya tidak dapat dimanipulasi (Degeng, 2013:11). Ini karena pada dasarnya tidak ada satu metode yang terbaik bagi semua tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran meliputi ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, studi kasus, inquiry, discovery, dan sebagainya.

Terkait dengan kelas inklusif dikenal adanya strategi pembelajaran yang melibatkan kolaborasi antara GPK dan guru kelas. Kolaborasi tersebut meliputi tim asisten-guru kelas dan model pendidik sebagai konsultan (disarikan dari Smith, 2015:401). Ini dilakukan untuk memfasilitasi ABK dalam kelas inklusif. Selain itu, strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik meliputi: a) tunarungu-wicara lebih baik ditempatkan dibagian depan agar mudah membaca gerakan bibir pendidik ketika sedang menjelaskan pelajaran dan optimalkan belajar dengan teman sebaya sehingga kemampuan komunikasinya dapat berkembang, b) retardasi mental perlu penurunan tingkat kesulitan pada setiap tugas yang diberikan dan berikan umpan balik positif selama kegiatan pembelajaran, c) tunadaksa perlu didukung dengan strategi *cooperative learning* melalui belajar kelompok dan adanya *team teaching* dalam membelajarkan peserta, d) berkesulitan belajar perlu penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berikan umpan balik; dorongan; serta evaluasi yang lebih sering, e) slow learner perlu diberikan waktu yang lebih lama untuk belajar maupun mengerjakan tugas; memperbanyak latihan daripada hafalan dan pemahaman; serta memperbanyak kegiatan remedial, f) autis perlu penggunaan metode pembelajaran *role playing* untuk memberikan contoh perilaku yang baik.

Jika melihat pada hasil penelitian, ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik di SD Negeri 1 Tirenggo.

metode pembelajaran yang dominan digunakan adalah ceramah diselingi dengan mengerjakan tugas yang ada di modul maupun LKS. Metode pembelajaran lain yang beberapa kali digunakan adalah strategi bermain peran untuk kelas bawah seperti kelas 1,2 dan 3. Sedangkan metode pembelajaran diskusi kerap diterapkan pada kelas tinggi yakni kelas 4, 5, dan 6. Baik metode diskusi maupun bermain peran sama-sama berpusat pada peserta didik sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk mengeksplor pengetahuan baik dengan sesama teman maupun dengan pendidik.

Ketika metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, maka pendidik akan menempatkan peserta didik tunarungu-wicara di kursi baris pertama sehingga memudahkannya untuk menangkap isi kalimat yang dilontarkan oleh pendidik. Ini merupakan bentuk fasilitasi bagi peserta didik tunarungu-wicara dalam kelas inklusif.

Ketika metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi maka peserta didik diarahkan oleh pendidik untuk mengatur meja dan kursi secara berkelompok dan saling berhadapan untuk memudahkan kegiatan diskusi dilakukan. Disini peserta didik berkebutuhan khusus dibaurkan bersama dengan peserta didik reguler. Pada saat dibagi kelompok diskusi maka akan ada satu atau beberapa ABK disetiap kelompoknya, sehingga mereka dapat berbaur bersama. Ini menunjukkan bahwasannya memang tidak ada diskriminasi dalam kelas inklusif. Strategi ini juga memberikan kemudahan bagi ABK baik slow learner, retardasi mental, hambatan berjalan, tuna ganda, tunarungu-wicara, autisme, maupun berkesulitan belajar untuk terlebiat aktif bersama dengan peserta didik reguler dalam memperoleh pengetahuan.

Ketika strategi pembelajaran yang digunakan adalah bermain peran, maka meja dan kursi akan didorong agak kebelakang untuk memberikan ruang pada peserta didik yang akan memainkan suatu peran didepan kelas. Hanya saja untuk peserta didik yang memiliki kelainan

fisik diberikan tambahan fasilitas agar tetap bisa mengikuti kegiatan bermain peran bersama dengan teman-temannya. Sedangkan untuk peserta didik slow learner, retardasi mental, berkesulitan belajar, dan tunarungu-wicara akan diberikan bimbingan secara personal dengan cara pendidik mendatangi satu persatu peserta didik tersebut untuk menanyakan apakah ada kesulitan, jika iya maka akan diberikan penjelasan ulang dan/atau dibimbing cara menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Bagi peserta didik autisme dan tuna ganda akan diberikan bimbingan oleh GPK jika sekiranya guru kelas tidak dapat memfasilitasi mereka dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Strategi ini dalam pelaksanaannya sudah mampu melibatkan keaktifan seluruh peserta didik, sehingga beragam jenis kebutuhan ABK mampu terfasilitasi. Adanya bantuan dari GPK juga merupakan bentuk kolaborasi antara guru kelas dan GPK dalam bentuk strategi tim asisten-guru kelas.

Selain 3 metode pembelajaran di atas, metode pembelajaran lain yang pernah digunakan para pendidik di SD Negeri 1 Trirenggo meliputi praktik langsung, penugasan, pengamatan, unjuk kerja, dan wawancara. Namun metode-metode pembelajaran tersebut tidak sesering penggunaan metode ceramah diskusi, dan bermain peran.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan di SD Negeri 1 Trirenggo sudah efektif karena dalam pelaksanaannya sudah mampu memfasilitasi seluruh peserta didik termasuk ABK yang ada disana. Setiap peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang sama dengan teman-temannya di kelas tersebut dan bagi ABK yang memang membutuhkan fasilitas pendukung maka akan disediakan sebagai bentuk fasilitasi bagi mereka yang berkebutuhan khusus.

Melihat pada pembahasan diatas nampak bahwa 3 indikator pelaksanaan efektif sudah keseluruhan terpenuhi, yakni kesesuaian fasilitas umum dengan kebutuhan peserta didik, kesesuaian media dan sumber belajar dengan

kebutuhan peserta didik, dan efektifitas strategi pembelajaran dengan proses pembelajaran di kelas inklusif. Jika diprosesntasekan akan menghasilkan

$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$, ini masuk dalam kategori sangat efektif jika disesuaikan dengan kriteria efektifitas pengelolaan fasilitasi belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fasilitasi belajar para program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tlrenggo sangat efektif yakni 100% memenuhi kriteria standar efektifitas pengelolaan fasilitasi belajar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tlrenggo cukup efektif yaitu memenuhi 50% kriteria standar pengelolaan fasilitasi belajar.
2. Pelaksanaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tlrenggo sangat efektif yaitu memenuhi 100% kriteria standar pengelolaan fasilitasi belajar.

Saran

Dari hasil penelitian mengenai evaluasi pengelolaan fasilitasi belajar pada program pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tlrenggo, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Bagi kepala sekolah
Dalam perencanaan pembelajaran sekiranya memang diperlukan PPI sebagai bentuk fasilitasi belajar pada ABK sebaiknya memberikan arahan kepada GPK, guru kelas, dan orang tua ABK dalam penyusunannya dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran, tidak sekedar pelengkap administrasi. Ini dilakukan agar perencanaan fasilitasi belajar menjadi lebih efektif.
2. Bagi guru kelas dan GPK
Kolaborasi yang dilakukan antara guru kelas dan GPK sebaiknya tidak hanya sekedar dalam memberikan bimbingan ketika

implementasi tetapi juga dalam perencanaan. Modifikasi kurikulum penting dilakukan bersama termasuk juga dengan orang tua ABK jika memungkinkan, untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S & Jabar, C.S.A. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan (Ed. 2)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Degeng, N.S. (2013). *Ilmu Pembelajaran: Klasifikasi Variabel untuk Pengembangan Teori dan Penelitian*. Bandung: Aras media.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional*.
- Depdiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang standar nasional pendidikan*.
- Depdiknas. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif*.
- Depdiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009, tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa*.
- Guntoro, E. (2015). Sekolah Jogja: Sekolah Inklusi Punya Banyak Kelebihan. *Solopos.com*. Diakses pada 9 Desember 2017.
- Marthan, L.K, Duyo, U. & Marentek, K.M. (2007). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Mudjiman, H. (2008). *Belajar Mandiri*. Solo: UNS Press.
- Sanjaya, W. (2013). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Smith, J.D. (2015). *Sekolah untuk Semua: Teori dan Implementasi Inklusi* (Terjemahan Denis & Enrica). Bandung: Nuansa Cendekia. (Edisi asli diterbitkan pada

tahun 1998 oleh Wadsworth Publishing Company).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung : Alfabeta.

Tarmansyah. (2007). *Inklusi: Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.

UNESCO. (2009). *Merangkul Perbedaan : Perangkat Untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran; Buku Khusus 3*. Jakarta : IDPN Indonesia.